

ISU RASIAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI MALAYSIA

Humphrey Wangke*)



Abstrak

Pemilihan Umum di Malaysia berlangsung pada tanggal 5 Mei 2013. Hasilnya memperlihatkan, koalisi Barisan Nasional tetap berhasil menguasai pemerintahan dengan mengumpulkan 133 kursi, sementara koalisi oposisi yang tergabung dalam Pakatan Rakyat hanya mampu mengumpulkan 87 dari total 222 kursi. Meskipun menang, popularitas Barisan Nasional mulai menurun karena gagal memperoleh dukungan dari kelompok etnis Cina. Akibatnya Partai MCA yang selama ini menjadi sekutu tradisional Barisan Nasional gagal memperoleh jumlah kursi seperti yang diharapkan dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam pemerintahan Malaysia lima tahun ke depan. Mundurnya MCA dari pemerintahan koalisi Barisan Nasional menyebabkan untuk pertama kalinya etnis Cina tidak lagi terwakili dalam pemerintahan.

A. Latar Belakang

Pada tanggal 5 Mei 2013 lalu, Malaysia menyelenggarakan pemilihan umum (Pilihan Raya Umum/PRU) ke-13 untuk memperebutkan 222 kursi parlemen. Adapun calon anggota parlemen yang ikut dalam pemilihan tersebut sebanyak 578 orang calon perwakilan partai dan 79 calon dari kelompok independen. Menurut sistem politik Malaysia, diperlukan 122 kursi untuk membentuk pemerintahan. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota parlemen daerah dan pusat. Hasil pemilu untuk parlemen pusat selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan koalisi

pemerintahan Kerajaan Malaysia. Pemilu ini sekaligus juga untuk menentukan koalisi mana saja yang berhak menyusun pemerintahan di 13 negara bagian. Pada pemilu terakhir tahun 2008, Pakatan Rakyat berhasil merebut pemerintahan di 5 negara bagian yaitu Penang, Kedah, Kelantan, Perak dan Selangor.

Pada pemilihan umum kali ini terdapat tiga koalisi yang bertarung, yakni Barisan Nasional, Pakatan Rakyat, dan kelompok independen. Barisan Nasional merupakan koalisi 13 partai dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak, sedangkan Pakatan Rakyat yang merupakan koalisi 3 partai dipimpin oleh pihak oposisi Anwar Ibrahim.

*) Peneliti Bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dhani_2000@yahoo.com



Kelompok independen tidak terlalu populer karena kalah pamor dengan dua koalisi lainnya yang bersaing ketat.

Pilihan Raya Umum/PRU ke-13 Malaysia mencatat rekor. Sebanyak 12.992.661 juta pemilih terdaftar atau sekitar 80% menggunakan hak pilih. Jumlah ini lebih tinggi dari rekor 78,9% yang tercatat pada tahun 1964. Tidak sedikit warga yang kembali ke daerah asal, termasuk mereka yang berdnas di luar negeri, hanya untuk PRU ke-13. Untuk itu, Suruhanjaya Pilihan Raya (Komisi Pemilihan Umum) menyediakan 8.425 tempat pemungutan suara dengan total 25.337 bilik pencoblosan. Jumlah penduduk Malaysia saat ini tercatat 28,9 juta jiwa.

Hasil pemilihan umum itu telah sama-sama kita ketahui, bahwa Barisan Nasional mengalami penurunan dalam raihan jumlah kursi di parlemen. Jika pada pemilihan umum ke-12 tahun 2008 Barisan Nasional meraih 140 kursi maka pada pemilihan tahun 2013 partai penguasa ini hanya memperoleh 133 kursi. Sebaliknya Pakatan Rakyat memperoleh tambahan 7 kursi menjadi 89 kursi di parlemen dibandingkan dengan pemilu tahun 2008.

Penurunan jumlah kursi Barisan Nasional menjadi semakin mengejutkan karena meskipun memperoleh kursi terbanyak, tetapi Barisan Nasional kalah populer dibandingkan Pakatan Rakyat dalam jumlah perolehan suara. Dari 12.992.661 orang yang mengikuti pemilu, Barisan Nasional memperoleh dukungan 5,22 juta suara sedangkan Pakatan Rakyat memperoleh 5,489 juta suara. Sisa suara diraih oleh kelompok independen. Mengapa Barisan Nasional mengalami kemunduran?

B. Isu Rasial dalam Pemilu

Isu etnis selalu menjadi topik menarik dalam setiap pemilu di Malaysia karena komposisi masyarakatnya yang hampir seimbang antara kelompok Melayu dan non-Melayu. Komposisi etnis di Malaysia terdiri dari etnis Melayu 54%, etnis Cina 25%, etnis India 7,5% sedangkan sisanya adalah suku asli yang terdiri dari 11%. Isu rasial di Malaysia

terbentuk dalam dunia perpolitikan di Malaysia sejak tahun 1970-an ketika pemerintah menerapkan kebijakan Bumiputera untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada etnis Melayu berperan dalam perekonomian nasional. Kebijakan ini secara perlahan menyingkirkan kelompok etnis Cina dan India yang banyak menguasai ekonomi Malaysia. Kebijakan Bumiputera di satu sisi berhasil meningkatkan status orang Melayu menjadi kelas menengah yang tinggal di perkotaan, tetapi di lain sisi telah menyingkirkan kelompok minoritas seperti etnis Cina dan India.

Penurunan suara Barisan Nasional tidak terlepas dari keberhasilan kubu oposisi memanfaatkan isu etnis dalam pemilu kali ini. Keharmonisan hubungan antar-etnis dan kekecewaan masyarakat terhadap tingkat korupsi menjadi tema utama kampanye kelompok oposisi. Bahkan Anwar Ibrahim secara jelas menyebutkan bahwa kroniisme di Malaysia telah menghilangkan peluang ekonomi bagi generasi muda Malaysia. Dua isu ini ternyata berhasil mempengaruhi pilihan politik kalangan etnis Cina dan generasi muda Malaysia.

Pada pemilu tahun 2013 ini, kelompok etnis Cina tetap mempertahankan kecenderungan, yang mulai terlihat sejak tahun 2008, untuk mengalihkan suaranya ke kelompok oposisi. Mereka tertarik dengan tema kampanye kelompok oposisi yang hendak mengakhiri korupsi dan kebijakan yang berbasis rasial. Sementara kalangan generasi muda Malaysia melihat, keberhasilan Anwar Ibrahim membentuk koalisi dengan partai sekuler Cina (DAP) dan Partai Islam Malaysia (PAS) yang konservatif akan mampu mendorong perubahan. Kalangan muda tidak ingin menjadi bagian dari kelompok kepentingan.

Beralihnya kubu etnis Cina dan kalangan muda ke kubu oposisi menjadi pertanda bahwa kelas menengah Melayu menghendaki perubahan. Rezim Barisan Nasional yang selama ini dianggap sebagai simbol persatuan Malaysia, mulai ditinggal oleh pendukung tradisionalnya. Diperkirakan banyak etnis

Cina yang menyeberang ke kubu oposisi. Hal ini terlihat dari berkurangnya peraihan suara Asosiasi Cina Malaysia (MCA) yang tergabung dalam Barisan Nasional yang hanya memperoleh lima kursi. Jumlah ini turun drastis dari perolehan 15 kursi pada pemilu tahun 2008. Beralihnya suara kelompok etnis Cina ini sangat merisaukan PM Najib sehingga menyebutnya sebagai “tsunami Cina”. Dukungan dari kelompok Melayu yang tinggal di perkotaan juga melemah, suatu pertanda bahwa kelompok menengah Malaysia juga menghendaki perubahan.

Kegagalan Najib Razak memimpin Barisan Nasional memenangi pemilu Malaysia di atas 140 kursi menjadi semakin ironis karena pemerintahnya telah menggelontorkan bantuan tunai menjelang pemilu. Dalam dua tahun terakhir pemerintahannya, PM Najib telah menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga miskin sebesar 2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp19,5 triliun. PM Najib juga memberikan bantuan ban gratis kepada para sopir taksi, meningkatkan upah bagi pegawai negeri sipil, serta bantuan bagi sekolah khusus etnis Cina dan India. Disamping itu, PM Najib juga memberikan bonus kepada pegawai Petronas, karyawan telekom dan kantor pos. Bonus juga diberikan kepada pegawai listrik negara. Hasil pemilu yang mengecewakan PM Najib ini akan memaksanya untuk melakukan berbagai aksi reformasi ekonomi, terutama pemotongan subsidi bahan bakar minyak dan pajak konsumsi guna mengurangi defisit anggaran yang kini mencapai 4,5% dari produk domestik bruto.

Hasil pemilu tahun 2013 di Malaysia mengindikasikan, rezim lama tetap berkuasa tetapi tidak merepresentasikan aspirasi kelompok minoritas negeri itu. Generasi muda Malaysia kini lebih memperhatikan identitas rasial daripada isu kesetaraan, transparansi dan pemerintahan yang demokratis. Barisan Nasional yang akan berkuasa kembali sudah seharusnya memperhatikan hal ini untuk masa depan Malaysia. Selanjutnya akibat kekalahan dalam pemilu tahun 2013 ini, Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA) yang menjadi koalisi Barisan Nasional, memutuskan untuk

tidak menerima tawaran jabatan dalam kabinet mendatang. Ketua MCA Chua Soi Lek yang kecewa dengan minimnya dukungan etnis Cina terhadap Barisan Nasional memutuskan bila MCA tidak mendapatkan 15 kursi maka tidak ada kadernya yang diperbolehkan menerima jabatan di pemerintahan.

C. Faktor Kegagalan Anwar Ibrahim

Kelompok oposisi mempunyai semangat tinggi untuk memenangi pemilu. Kubu oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim mengusung tema perubahan, sesuatu yang sangat wajar diperjuangkan mengingat Malaysia telah dikuasai Barisan Nasional sejak tahun 1957. Semangat perubahan dan keinginan merebut momentum bersejarah begitu kental terasa selama masa kampanye yang berlangsung selama 15 hari dari tanggal 20 April dan berakhir dengan pemilihan umum pada tanggal 5 Mei.

Isu perubahan telah menjadi kecenderungan dalam berbagai pemilu di dunia pada saat kelompok oposisi ingin memenangkan pemilu. Sejarah mencatat banyak pemimpin negara berkarakter yang membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Evo Morales (Bolivia), Mahmoud Ahmaddinejad (Iran), Hugo Chaves (Venezuela), atau Mikhael Gorbachev, merupakan contoh dari tokoh-tokoh pro-perubahan, walaupun pada akhirnya mereka harus menanggung sendiri risiko akibat perubahan yang mereka lakukan.

Didalam sejarahnya pula, perubahan seringkali harus dimulai dengan menghancurkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah kekuasaan lama. Risikonya adalah menghadapi benturan atau perlawanan, bahkan dihadap oleh pemegang kekuasaan yang tetap ingin mempertahankan *status quo*. Hal tersebut menunjukkan perubahan melibatkan ongkos atau konsekuensi yang tidak mudah diterima secara sosio kultural, sebab sangat mungkin kemajuan yang dijanjikan oleh demokrasi hanya berakhir pada hancurnya

struktur kohesi sosial. Karena itu, tidak semua orang mau mendukung perubahan dalam arti sesungguhnya, terutama jika sudah menyangkut kekuasaan dan rasa aman.

Anwar Ibrahim yang menjadi tokoh sentral kelompok oposisi yang mengusung tema perubahan, untuk yang kedua kalinya merasakan tidak mudahnya mengubah struktur masyarakat Malaysia yang sudah mapan dengan struktur kekuasaan yang sudah terbangun sejak 50 tahun terakhir ini. Keinginannya untuk memimpin Malaysia kembali gagal meskipun ia sendiri tetap akan menjadi anggota parlemen. Masyarakat Malaysia belum siap sepenuhnya untuk melakukan perubahan.

D. Masa Depan Hubungan RI-Malaysia

Walaupun kursi Barisan Nasional turun dari perolehan sebelumnya dan perolehan kursi Pakatan Rakyat meningkat, namun pemerintahan Malaysia akan tetap dikuasai Barisan Nasional.

Apa artinya bagi Indonesia? Siapa pun pemenangnya hubungan Malaysia-Indonesia tidak akan banyak berubah. Kalau partai PM Najib Razak yang menang, maka hubungan Indonesia-Malaysia akan kurang lebih sama dan menganggap hubungan dengan Indonesia penting sebagai saudara serumpun.

Seandainya kubu Anwar Ibrahim yang menang, hubungan dengan Indonesia kemungkinan akan sedikit lebih hangat mengingat sikap Anwar Ibrahim yang sangat mendukung perbaikan hubungan Malaysia dengan Indonesia.

Dengan hasil pemilu Malaysia 2013 yang menunjukkan kemenangan Barisan Nasional ini diharapkan warga Indonesia yang jumlahnya jutaan orang di Malaysia mendapatkan perlakuan yang lebih baik di bawah pemerintahan PM Najib Razak. Malaysia pasti membutuhkan mereka dan sudah selayaknya Malaysia menghormati dan memperlakukan orang-orang Indonesia sebagai saudara serumpun.

Rujukan:

1. "Pemilu Semakin Mendebarkan," *Kompas*, 4 Mei 2013, h. 9.
2. "Barisan Nasional Unggul Sementara," *Kompas*, 6 Mei 2013, h. 1.
3. "Barisan Nasional Masih Kuat," *Media Indonesia*, 6 Mei 2013, h. 1.
4. "Harus Menang Meyakinkan," *Media Indonesia*, 5 Mei 2013, h. 1.
5. "Sengit Sampai Hari Akhir," *Kompas*, 5 Mei 2013, h. 1.
6. "Najib Najib Mengundang Tanya," *Media Indonesia*, 7 Mei 2013, h. 12.
7. "Najib Faces Limited Future After Worst Showing," *The Jakarta Post*, 7 Mei 2013, h. 1.